

# **PENERAPAN PROGRAM – PROGRAM HASIL MUSYAWARAH PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DALAM PEMBANGUNAN DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Eko Asep Kasiantoro<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Program-Program Hasil Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggrong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan analisis dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis) dari Matthew B. Milles & A. Michael Huberman yang meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Berdasarkan penelitian dapat diketahui penerapan pembangunan yang telah terlaksana seperti pembangunan jembatan dan pengecoran jalan utama Desa Manunggal Jaya. Pembangunan (MUSRENBANG) menggunakan dana APBD Kabupaten/ADD Desa secara bertahap.*

*Dari hasil penelitian data-data yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari analisis tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Manunggal Jaya, bahwa Kepala Desa dan Masyarakat pada dasarnya telah berupaya melaksanakan peran serta fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut.*

***Kata kunci*** : *Musrenbang, Pembangunan, Penerapan Program, Tenggarong Seberang*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya.

Salah satu proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang. Musrenbang merupakan salah satu wahana perencanaan partisipatif yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ekoasepkasiantoro15@yahoo.com

melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan untuk mengenali masalah, potensi, kebutuhan, tantangan eksternal dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa pembangunan desa Manunggal Jaya telah direncanakan dalam Musrenbang Desa tahun 2014, tetapi dalam penerapannya masih tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan serta belum memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat selain itu program-program yang telah diputuskan belum terealisasi dengan baik sehingga pembangunan yang dirasakan belum optimal.

Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Program – Program Hasil Musyawarah Pembangunan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Pembangunan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Teori dan Konsep***

Dalam rangka melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah tentu harus didukung teori dan konsep yang sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan bagi peneliti. Teori dan konsep yang dikutip bertujuan untuk memberikan batasan dan gambaran dari penelitian yang akan dilakukan. Serta digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti selain itu berguna sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan.

### ***Perencanaan Pembangunan***

Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat seriat menggunakan asumsi-asumsi mengenai, masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (George R.Terry dalam Riyadi,2005:2).

Sedangkan definisi pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan tidak dapat terlepas dari perencanaan, sebelum melakukan pembangunan harus dilakukan perencanaan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan memiliki 4 tahapan yaitu : Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana, dan Evaluasi pelaksanaan rencana.

### ***Pengertian Pembangunan***

Menurut Soetomo (2008), pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya

yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

### ***Karakteristik Pembangunan***

Karakteristik pembangunan integral mengandung arti bahwa program pembangunan disatu sektor tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan disektor lain. Pembangunan ekonomi misalnya, tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan politik yang adil dan jujur serta bersih dari penyimpangan, pembangunan hukum yang berkeadilan, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertumpu pada kekuatan sendiri, serta pembangunan sosial budaya yang berakhlak. Sedangkan Karakteristik pembangunan universal memberikan pengertian bahwa aset-aset pembangunan haruslah dipergunakan untuk kepentingan lintas generasi, lintas teritorial, dan bahkan lintas kehidupan (dunia akhirat).

Karakteristik pembangunan partisipasi total adalah bahwa pembangunan harus dilakukan oleh seluruh aktor pembangunan sesuai perannya. Untuk itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat agar mereka setara sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kepentingan bersama. Kesetaraan ini tidak hanya dari segi kedudukannya tetapi juga kualitasnya, sehingga diperlukan pendidikan politik.

### ***Ciri-ciri Pembangunan***

Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P. Siagian (2008), yaitu: pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah pada modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, dan semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

### ***Tujuan Pembangunan***

Tujuan pembangunan di negara manapun tentunya untuk kebaikan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siagian dalam Nawawi (2009), pada umumnya komponen yang dicita-citakan

dalam keberhasilan pembangunan adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “*titik jenuh yang absolut*”, dan yang sudah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi, seperti: keadilan sosial; kemakmuran yang merata; perlakuan yang sama dimata hukum; kesejahteraan material, mental, dan spiritual; kebahagiaan untuk semua; ketentraman; serta keamanan.

Tujuan khusus (*objectives*) pembangunan adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. Sedangkan target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan.

### ***Visi dan Misi Pembangunan***

Agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang telah dituangkan dalam prioritas pembangunan, maka visi dan misi pembangunan haruslah selaras dengan tujuan pembangunan, sehingga dapat menumbuhkan komitmen pelaksana pembangunan untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan dalam proses kreatif dan intuitif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

### ***Model-model Pembangunan***

Menurut Nawawi (2009), berdasarkan paradigma pembangunan yang berkembang (*intergrating Development Paradigma*) pada empat dasawarsa pertama sejak awal 1950-an hingga sekarang, sedikitnya terdapat lima model-model pembangunan, yaitu: model saling hubungan, model pertumbuhan, model pemerataan, model pembangunan manusia, dan model peningkatan daya saing.

Model saling hubungan adalah model pembangunan yang mempunyai relevansi antara paradigma administrasi publik dengan paradigma pembangunan sosial ekonomi politik.

### ***Konsep Pembangunan yang Ideal***

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen seluruh komponen masyarakat. Idealnya, berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi “pemain” dan tidak ada yang sekedar menjadi “penonton”.

### ***Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan***

Menurut Tjokroamidjojo dalam Nawawi (2009), Faktor yang mempengaruhi pembangunan dan mempunyai relevansi dengan kondisi masyarakat antara lain: masyarakat yang masih tradisional, masyarakat yang bersifat peralihan, dan Masyarakat maju (modern).

### ***Teori Kebijakan Publik***

Teori kebijakan publik, dimana menurut Carl J Frederick (dalam Winarno, 2008:17) “ kebijakan adalah suatu arahan tindakan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu” Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam hal perumusan kebijakan publik.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional adalah merupakan pembatasan pengertian suatu konsep dengan konsep lain. Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda, maka dari variabel di atas secara konsepsional dapat dirumuskan sebagai berikut : “Penerapan Program-Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan apa yang telah disepakati oleh seluruh Steakholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan data yang dikumpulkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

### ***Fokus Penelitian***

Penentuan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi zona pengamatan penelitian agar tidak terjebak pada bidang yang sangat luas atau kurang relevan. Selain itu penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005 : 63), sebagai berikut : (1) Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, maka penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. (2) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang mengalir. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu akan direduksi.

### ***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 yaitu, meliputi :

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti atau memiliki hubungan terhadap objek yang akan diteliti. Penulis memperoleh data primer dari nara sumber atau informan dengan cara

melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung dari informan dan telah diolah yang berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap penting. Serta data pendukung yang diperoleh dari teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berkaitan dan dapat mendukung obyek yang akan diteliti.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut :

- 1) Mempelajari perundang-undangan dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data dan fakta empirik secara langsung di lapangan guna mendapatkan data-data primer, melalui :
  - a. Pengamatan langsung (*observasi*), yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai penerapan program-program musrenbang di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - b. Wawancara, khusus informan yang ada di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Teknik Analisis Data***

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kualitatif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum***

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kelanjutan dari Kabupaten Kutai sebelum adanya pemekaran pada tahun 1999. Pada tahun 1999 daerah Kabupaten Kutai dimekarkan lagi menjadi 4 daerah otonom, yaitu Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Untuk membedakan Kabupaten Kutai sebagai daerah hasil pemekaran, maka nama Kabupaten Kutai diubah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara ([id.wikipwdia.org](http://id.wikipwdia.org) diakses tanggal 9 desember 2015).

Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 27.263,10 km<sup>2</sup> dengan luas perairan kurang lebih 4.097 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan, 18 kecamatan tersebut adalah, Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun,

Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Samboja, Sanga-Sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Salah satu desa yang terdapat di Tenggarong Seberang adalah Desa Manunggal Jaya.

### ***Kondisi Geografis***

Secara geografis Desa Manunggal Jaya adalah ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang, berdekatan dengan Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Tenggarong.

Batas wilayah Desa Manunggal Jaya meliputi :

- a. Sebelah Utara : Desa Bangun Rejo
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Sempaja Samarinda
- c. Sebelah Selatan : Desa Karang Tunggal
- d. Sebelah Barat : Desa Tanjung Batu

### ***Kondisi Topografis***

Luas wilayah Desa Manunggal Jaya secara keseluruhan yaitu 16.350 Km<sup>2</sup>. Dimana sebagian besar wilayahnya terdiri atas daratan, dengan pembagian Sawah tanah hujan : 27 ha, tanah kering tegal : 40 ha, pemukiman : 31 ha, tanah rawa : 5 ha, perkantoran pemerintah : 2 ha.

### ***Kondisi Demografis***

Desa Manunggal Jaya terdiri dari 23 RT dengan jumlah 1.759 KK, kondisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Laki – laki berjumlah 3.180 orang dan Perempuan berjumlah 3.160 orang. Jadi total keseluruhan penduduk 6.343 orang.

### ***Penerapan Program Musrenbang bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan***

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan tidak dapat berjalan maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak berperan atau berfungsi, karena itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan tentang Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Di Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kampung di Kampung Tepian Ulaq dan Kampung Gunung Bayan dilakukan camat melalui

- rapat-rapat maupun kordinasi secara langsung bersama petinggi bersama perangkat dan jajarannya.
2. Bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung sering dilakukan camat dengan melakukan kunjungan ke kampung Gunung Bayan dan kampung Tepian Ulaq.
  3. Pembinaan dan pengawasan terhadap petinggi kampung dilakukan camat secara langsung melalui rapat kordinasi, pengarahan dan penjelasan tentang tugas dan fungsi petinggi kampung itu sendiri.
  4. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung jarang dilakukan camat, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat berupa masukan tentang pelayanan teknis administasi dan tugas pembantuan kepada petinggi.
  5. Faktor penghambat peran camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kampung adalah fasilitas prasarana yang tidak memadai dan lemahnya sumber daya manusia yang ada.

### **Saran**

Dilihat dari beberapa faktor-faktor penghambat peran camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kampung, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kampung, akan sangat baik apabila camat selain memberikan pelatihan-pelatihan rutin, camat juga harus bisa memfasilitasi petinggi-petinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, seperti membantu petinggi dalam membangun komunikasi yang baik antar petinggi, berkordinasi baik kepada perangkatnya, agar petinggi didalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat bekerja sama dengan perangkatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung diharapkan camat tidak hanya sekedar memberikan pelatihan kepada petinggi dan perangkatnya dalam pelaksanaan administrasi, tetapi camat juga harus melakukan pengawasan yang tegas terhadap jalannya administrasi pemerintahan kampung, menindak lanjuti setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan kampung seperti tapal batas kampung, membantu proses dan jalannya pemerintahan kampung dalam mencari jalan keluar dengan membantu petinggi dan perangkatnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
3. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petinggi kampung, diharapkan camat tidak hanya sekedar melakukan penjelasan tentang tugas dan fungsi petinggi saja, tetapi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keberhasilan pembangunan kampung, camat dapat melakukan pelatihan kepemimpinan kepada petinggi kampung secara individu, sebab tidak semua petinggi memiliki kemampuan yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ditambah beragam dan berbedanya masalah yang dihadapi sehingga

camat harus bisa memberikan pembinaan sesuai kebutuhan kampung itu sendiri.

4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung, di kampung Gunung Bayan, sebagian tugas dan fungsi petinggi dilimpahkan kepada juru tulis kampung, hal ini dikarenakan pak petinggi tidak menetap di kampung dan hanya sesekali mengunjungi kampung Gunung Bayan, sehingga peran ganda harus dijalankan juru tulis kampung, banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sudah seharusnya camat lebih memperhatikan kampung Gunung Bayan, seperti membantu memfasilitasi hubungan yang baik antara perangkat kampung dengan masyarakat, memfasilitasi dan mengkordinasikan perangkat kampung dan masyarakat kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah kampung Gunung Bayan. Sedangkan di kampung Tepian Ulaq bimbingan supervisi fasilitasi dan konsultasi yang dilakukan camat sudah maksimal.
5. Faktor penghambat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kampung penulis kemukakan menjadi dua bagian yaitu faktor Sarana dan Prasarana, dan Sumber Daya Manusia. Agar pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat dapat berjalan maksimal diharapkan Pemerintah Pusat maupun Daerah secepatnya dan segegera mungkin memberikan perhatian khusus kepada Kecamatan Muara Pahu, dengan membangunkan prasarana yang baik seperti jalan penghubung yang layak agar pemerintahan kampung bisa terhubung baik dengan pusat pemerintahan kecamatan maupun pusat pemerintahan kabupaten Kutai Barat.

Dalam meningkatkan sumber daya manusia diharapkan pemerintah kabupaten agar sesering mungkin mengadakan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada petinggi kampung maupun perangkatnya. kepada pemerintahan kecamatan khususnya camat diharapkan agar program pelatihan-pelatihan rutin kepada petinggi-petinggi dan perangkat kampung yang terus dilakukan secara serentak dan bersamaan. dan kepada petinggi-petinggi kampung dihibmabau diharapkan agar tidak bosan-bosannya belajar dan terus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak kabupaten maupun pihak kecamatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Gibson, 2003. *Organisation*, Jilid 1, Terjemahan Darkasih. Erlangga, Jakarta.
- Gunawan, Adi. 2003. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi Ke 2 Jakarta, 1994.
- Murdiyatmoko, Janu. 2007. *Sosiologi*. Jakarta : PT. Grafindo Media Pratama.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Miles, Matthew B, A. Michael Hubberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Soucebook*, Sage Publications.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Gelora Aksara Pratama. 2011
- Rivai, Viethzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samuel Edward Finer. 1974. *Comparative Government*:
- Sarwoto, 1981. *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali, Jakarta, 1993.
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Winardi J. 2000. *Pengantar Teori Sistem dan Analisis Sistem* . Cetakan ke 4. Bandung: Mandar Maju.
- Yayuk dan Mangku, *Sosiologi Pedesaan*, Lappera Pustaka Utama, 2003.

***Dokumen-Dokumen :***

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2001, Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kampung
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 16 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pembentukan dan Penetapan Peraturan Kampung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa